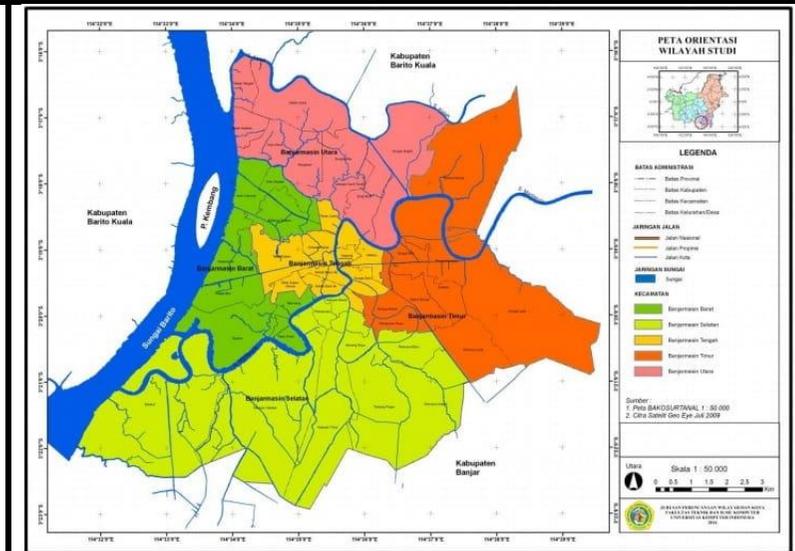


# KOTA BANJARMASIN

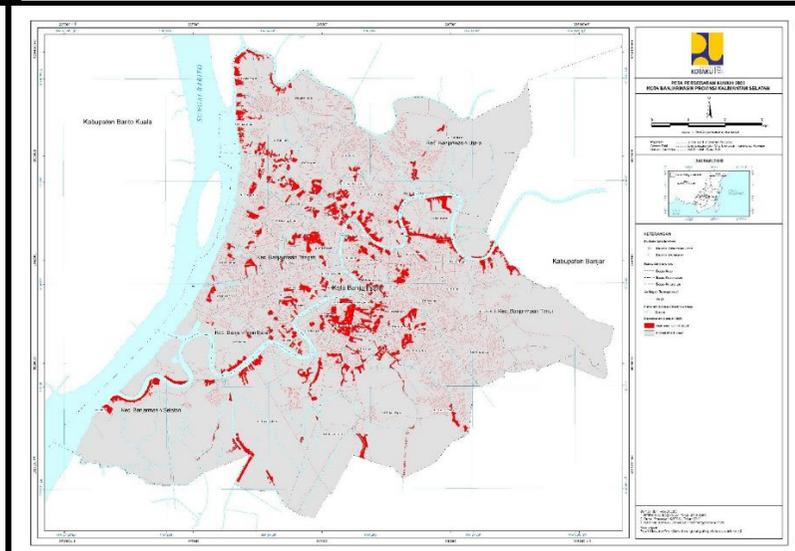
## 1. PROFIL KOTA

**Organisasi teritorial**, pembentukan kota Daerah Tk.II Kota Banjarmasin ditetapkan pada tanggal 26 Juni 1959, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran-negara tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-undang  
Berdasarkan Undang – undang tersebut wilayah Kota Banjarmasin seluas 98.46 Km<sup>2</sup> meliputi wilayah 5 (lima) Kecamatan:

KECAMATAN	LUAS KECAMATAN Km <sup>2</sup>	%	JUMLAH KELURAHAN /DESA
Banjarmasin Selatan	38.30	38.90	12
Banjarmasin Tengah	6.65	6.75	12
Banjarmasin Timur	23.50	23.87	9
Banjarmasin Barat	13.11	13.32	9
Banjarmasin Utara	16.90	17.16	10

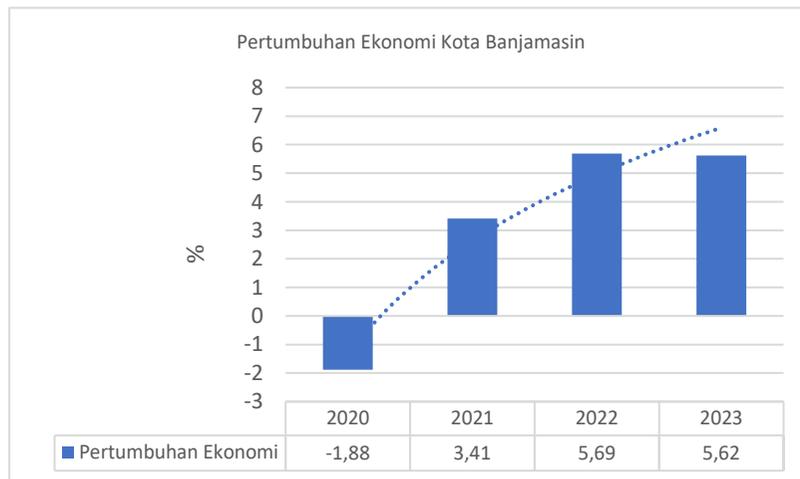


**Populasi**, Kota Banjarmasin sebanyak 666.440 jiwa, berdasarkan data sensus tahun 2023 rata – rata Pertumbuhan penduduk tahunan: 0.43%. Tingkat Kepadatan: 6.769 jiwa/km<sup>2</sup>, termasuk kedalam kategori tinggi



**Ekonomi**, kondisi perekonomian kota Banjarmasin. terdiri dari:

- PDRB ADHK dari tahun 2020 – 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 8.75%, kondisi PDRB ADHK kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi ditahun 2022 dimana pertumbuhannya mencapai 11,27%, PDRB ADHK Kota Banjarmasin ditahun terakhir (2023) sebesar Rp. 42.050.000.000,-
- Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin dari tahun 2020-2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,5% Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 sebesar -1,88% yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Banjarmasin pada tahun 2022 sebesar 5,69%. (rata rata nasional tahun 2023 sebesar 5,04%)
- Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2020. - 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,47 %. Pada tahun terakhir (tahun 2023) IPM Kota Banjarmasin adalah sebesar 78.5 termasuk kedalam kategori tinggi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2020 - 2023 pertumbuhannya pertahunnya menurun -0.54%.
- Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) Kota Banjarmasin dari tahun 2020 - 2023 Rata rata 0,35 termasuk kedalam kategori Ketimpangan Rendah, berada dibawah rata rata nasional tahun 2023 sebesar 0,388.



Manajemen utilitas: Kota Banjarmasin Memiliki 2 Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang Jasa Penyediaan Air Bersih dan Jasa Layanan Persampahan, dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut sudah tidak didanai oleh APBD.

Staf kota, Jumlah Pegawai Negeri adalah sebanyak 4,444 orang dengan komposisi jabatan struktural 629 Orang, jabatan fungsional umum 971 orang dan jabatan fungsional tertentu 2.842 Orang, sementara P3K 1.507 Orang.

Uraian	PNS			Non PNS
	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	P3K
Pegawai yang tersedia (Eksisting)	629	2,842	971	1.507
<b>Total</b>	629	2,842	971	1.507
<b>%</b>				
Kebutuhan pegawai Berdasarkan Anjab	661	5113	4,850	2,650
<b>Total</b>	661	5113	4,850	2,650
<b>%</b>				

Berdasarkan data diatas Berdasarkan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa jabatan masih memerlukan penambahan pegawai

Rencana Investasi Kota Banjarmasin berdasarkan data belum ada rencana investasi.

Isu strategis kota Banjarmasin:

1. Permasalahan Tingkat kemiskinan daerah relatif rendah dibandingkan angka nasional
  2. Kualitas Infrastruktur yang masih rendah
  3. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan kota
  4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik masih kurang optimal
- sasaran pembangunan RKP tahun 2023, antara lain:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
  2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
  3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
  4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
  5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
  6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
  5. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107
  6. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %



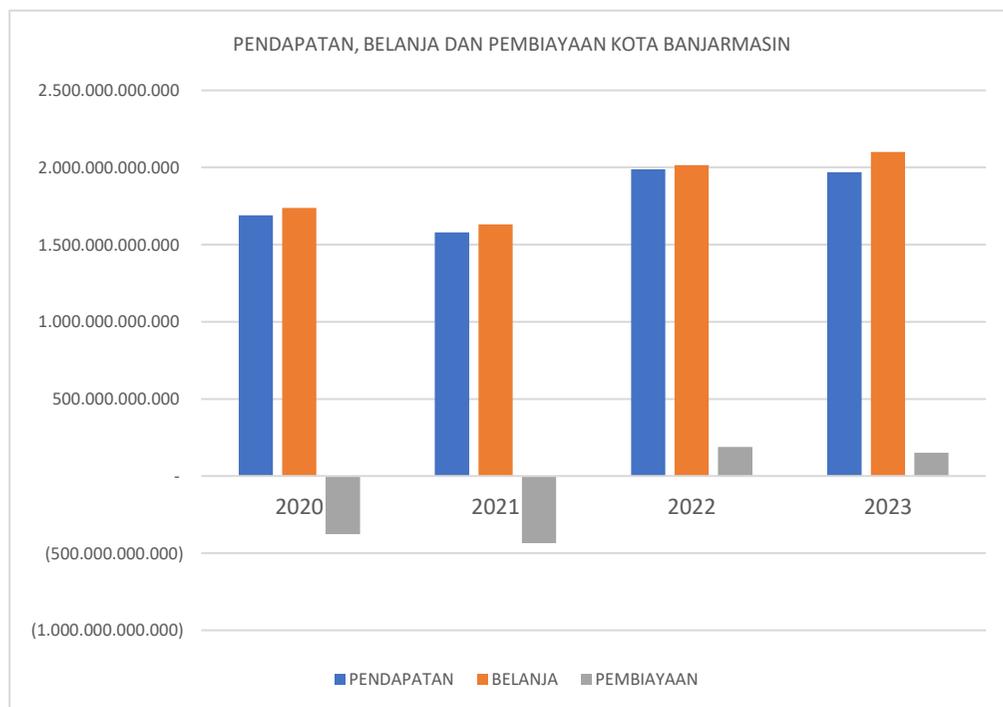
Permasalahan Pengelolaan keuangan daerah:

- Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan kota
- Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik masih kurang optimal

## 2. SITUASI KEUANGAN<sup>1</sup>

Tabel situasi keuangan

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata rata pertumbuhan
TOTAL PENDAPATAN	1.690.218.106,447	1.578.707.401,659	1.987.895.069,884	1.968.636.841,217	0.06
TOTAL BELANJA	1.738.016.037,867	1.631.952.649,330	2.016.011.007,631	2.100.581.583,820	0.07
Belanja Operasi	1.294.199.159,929	1.275.181.857,832	1.468.805.027,669	1.625.987.545,435	0.08
Belanja Modal	371.823.601,532	350.064.775,032	546.273.979,962	472.916.740,885	0.12
Belanja Tak Terduga	70.857.198,517	6.706.016,466	546.273.979,962	1.677.297,500	26.19
Belanja Transfer	1.136.077,889	-	-	-	-0.33
TOTAL PEMBIAYAAN	- 377.139.670,065	-435.089.848,527	188.180.124,980	150.064.187,234	-0.49



Kurs<sup>2</sup>: 1 US \$ = Rp. 16.100,00

Indeks inflasi<sup>3</sup>: indeks inflasi tahun 2021= 2,52%, 2022 = 2,52%, 2023 = 2,28%

- Rata rata Pendapatan Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 1.806.364,354.802,- atau pertumbuhan rata rata pertahun adalah sebesar 0.06 %, ditahun terakhir (tahun 2023) Total Pendapatan kota Banjarmasin adalah sebesar Rp. 1.968.636.841.217,- dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan Rp. - 9,258,228,668,- atau menurun sebesar -0.97% dari tahun sebelumnya
- Rata rata belanja Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 1.871.640.319,662,- atau pertumbuhan rata rata pertahun menurun sebesar - 3,13%. Posisi belanja saat ini (2023) adalah sebesar Rp 1.147.461.661.082,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 84.570.576.189,- atau meningkat sebesar 4.19%.

• rata rata pendapatan dan belanja kota banjarmasin terjadi defisit setiap tahunnya,

- **Komposisi belanja pada tahun 2023 (tahun terakhir) adalah**

Uraian	Rp	Komposisi Belanja (%)
Total Belanja	2,100,581,583,820	100%
Belanja Operasi	1,625,987,545,435	77.41%
Belanja Modal	472,916,740,885	22.51%
Belanja Tak terduga	1,677,297,500	0.08%
Belanja Transfer	-	0.00%

Tabel diatas menunjukan bahwa belanja operasi (77.41%) memiliki proporsi paling tinggi dari total belanja daerah, perbanding antara belanja operasi dengan belanja modal adalah kurang lebih 3 : 1 ( belanja modal hanya sebesar 22,51% )  
Proporsi belanja dalam APBD masih belum ideal jika menggunakan pemenuhan Mandat UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 1 tahu 2024. tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional ( rata rata selama 4 tahun)

<sup>1</sup> Laporan ringkasan pada bagian situasi keuangan kota adalah penjelasan data tahun terakhir

<sup>2</sup> Kurs terhadap dollar merupakan kesepakatan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang merupakan titik tengah antara kurs jual dan kurs beli

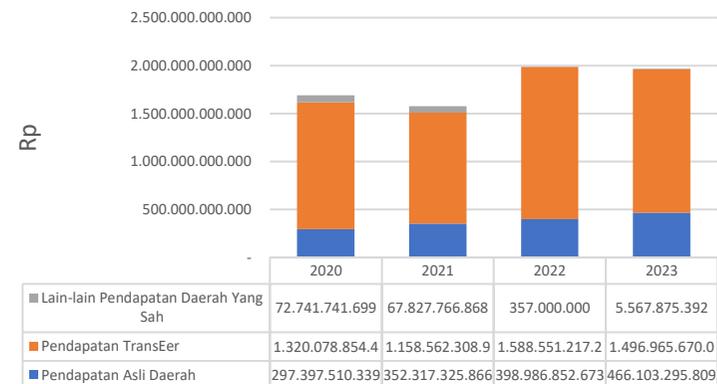
<sup>3</sup> Tingkat infalsi bersumber dari data badan pusat statistic yang ada di daerah

### 3. ANALISIS HISTORIS: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

#### PENDAPATAN

URAIAN	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	168,136,997,436	198,878,947,380	258,154,500,148	307,458,966,093	
Pendapatan Retribusi Daerah	58,848,923,162	33,470,957,447	33,344,874,546	36,852,796,059	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,253,669,496	26,418,742,795	19,909,453,001	30,408,079,044	
Lain-lain PAD yang sah	49,157,920,245	93,548,678,244	87,578,024,978	91,383,454,613	
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>297,397,510,339</b>	<b>352,317,325,866</b>	<b>398,986,852,673</b>	<b>466,103,295,809</b>	<b>16.18%</b>
<b>B. Pendapatan TransEer</b>					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,049,972,496,809	955,111,861,896	1,305,853,770,675	1,202,859,716,092	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	82,894,477,000	34,585,555,000	10,392,912,000	34,356,178,000	
Dana Insentif Fiskal	187,211,880,600	168,864,892,029	272,304,534,536	259,749,775,924	
<b>Total Pendapatan TransEer</b>	<b>1,320,078,854,409</b>	<b>1,158,562,308,925</b>	<b>1,588,551,217,211</b>	<b>1,496,965,670,016</b>	<b>6.37%</b>
<b>C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>					
Pendapatan Hibah	71,866,859,699	66,575,678,000	357,000,000	5,567,875,392	
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	874,882,000	1,252,088,868	-	-	
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>72,741,741,699</b>	<b>67,827,766,868</b>	<b>357,000,000</b>	<b>5,567,875,392</b>	<b>451.13%</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,690,218,106,447</b>	<b>1,578,707,401,659</b>	<b>1,987,895,069,884</b>	<b>1,968,636,841,217</b>	<b>6.12%</b>

PROPORSI PENDAPATAN KOTA BANJARMASIN



Pertumbuhan rata rata pendapatan kota Banjarmasin sebesar 6,12%.  
Proporsi Pendapatan transfer paling besar dibanding dengan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata rata sebesar 77,01%

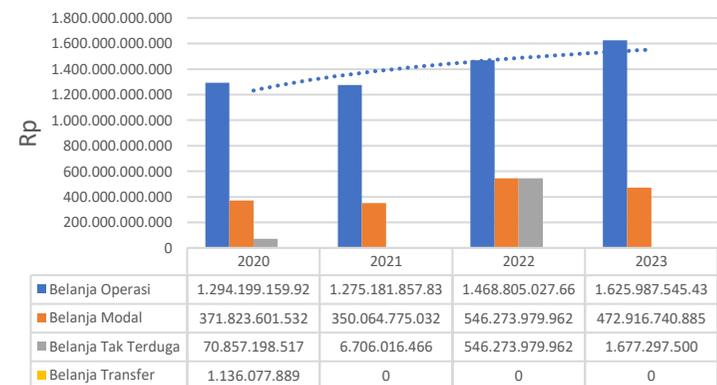
Kesimpulan pendapatan daerah :

- Pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin rata rata pertahun sebesar Rp. 378,701,246,172,- atau 20,96% dari total pendapatan, hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah melalui penggalan potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi
- Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer kota banjarmasin tinggi, ditahun 2020 merupakan pendapatan transfer paling tinggi dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) sebesar Rp. 1,588,551,217,211,-

#### BELANJA

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata rata pertumbuhan
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,738,016,037,867</b>	<b>1,631,952,649,330</b>	<b>2,016,011,007,631</b>	<b>2,100,581,583,820</b>	<b>7.21%</b>
Belanja Operasi	1,294,199,159,929	1,275,181,857,832	1,468,805,027,669	1,625,987,545,435	8.14%
Belanja Modal	371,823,601,532	350,064,775,032	546,273,979,962	472,916,740,885	12.26%
Belanja Tak Terduga	70,857,198,517	6,706,016,466	546,273,979,962	1,677,297,500	2618.60%
Belanja Transfer	1,136,077,889	-	-	-	-33.33%

PROPORSI BELANJA KOTA BANJARMASIN



Belanja daerah kota Banjarmasin rata rata pertumbuhan selama 4 tahun ( 2020 – 2023) sebesar 7,21%

Proporsi belanja terbesar yaitu pada belanja operasi, rata rata pertahun sebesar Rp. 1.416.043.397.716,- atau sebesar 75.66%. dari total belanja

berdasarkan grafik diatas bahwa belanja operasi setiap tahunnya meningkat dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 8.14%, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan.belanja operasi.

Tahun	Anggaran dan Realisasi Belanja			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase (%)
2020	1,853,821,393,410.00	1,738,015,037,866.95	-115,806,355,543.05	6.25%
2021	1,944,450,993,535.00	1,631,952,649,329.93	-312,498,344,205.07	16.07%
2022	2,219,685,312,576.00	2,016,011,007,630.52	-203,674,304,945.48	9.18%
2023	2,775,246,384,200.00	2,100,581,583,820.00	-674,664,800,380.00	24.31%
Rata-rata			<b>-346,916,482,348.15</b>	<b>14.93%</b>

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dianalisa bahwa Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran pada Pemerintah Kota Banjarmasin karena realisasi yang dicapai tidak melebihi anggaran. Hal ini menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai

#### Pembiayaan Kota Banjarmasin

URAIAN	2020	2021	2022	2023
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	269,727,666,893	251,425,372,437	198,180,124,765	160,064,187,234
Pencairan Dana Cadangan	29,478,543,988			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			215	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Penerimaan Piutang Daerah				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>299,206,210,881</b>	<b>251,425,372,437</b>	<b>198,180,124,980</b>	<b>160,064,187,234</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	676,345,880,946	686,515,220,964	10,000,000,000	10,000,000,000
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>676,345,880,946</b>	<b>686,515,220,964</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>- 377,139,670,065</b>	<b>- 435,089,848,527</b>	<b>188,180,124,980</b>	<b>150,064,187,234</b>
<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN</b>	<b>- 424,937,601,485</b>	<b>- 488,335,096,199</b>	<b>160,064,187,234</b>	<b>18,119,444,631</b>

- Berdasarkan data diatas bahwa penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya, Penerimaan pembiayaan Kota Banjarmasin setiap tahunnya (tahun 2020 – 2023) cenderung menurun
- Pengeluaran pembiayaan kota Banjarmasin berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.

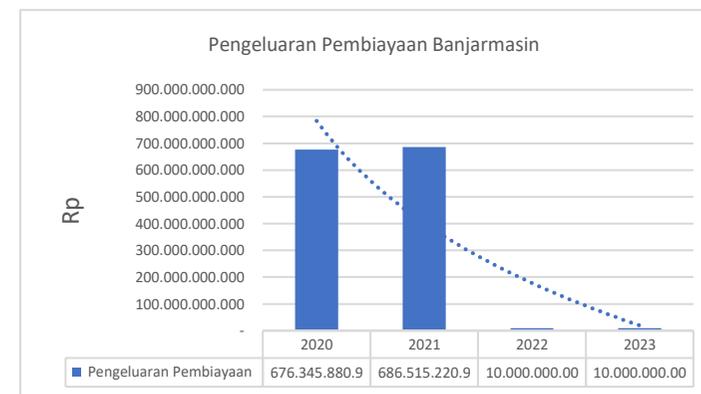
#### Kesimpulan belanja daerah

- Bahwa kecenderungan proporsi belanja daerah kota Banjarmasin lebih kepada belanja operasi sebesar > 75%. atau rata rata pertahun Rp. 1.416.043.397.716,-. Jika dibandingkan dengan rata rata pendapatan nasional sebesar Rp. 1.372.910.359.836,- berada diatas rata rata nasional

#### 4. ANALISIS RASIO



Penerimaan pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi penurunan

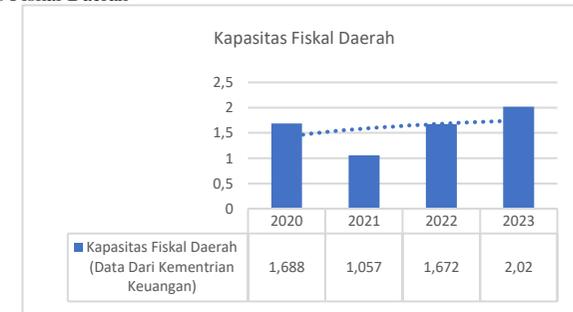


Pengeluaran pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi penurunan

Analisis Rasio Kota Banjarmasin

No	RASIO	TOLAK UKUR REGULASI INDONESIA	HASIL / NILAI				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	
<b>1</b>	<b>OTONOMI FISKAL</b>						
	a. Kapasitas Fiskal Daerah (Data Dari Kementerian Keuangan)		<b>1.688</b>	<b>1.057</b>	<b>1.672</b>	<b>2.02</b>	
			<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
	b. Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal	> 40%	17.60	22.32	20.07	23.68	20.91
	c. Tingkat Ketergantungan	< 40%	78.10	73.39	79.91	76.04	76.86
	d. Kapasitas Riil Pendanaan		47.00%	43.46%	52.49%	30.85%	43.45%
<b>2</b>	<b>KELAYAKAN KREDIT</b>						
	a. Solvabilitas		82.8	147.5	136.9	17.6	96.20
	b. Quick Ratio		6.32	9.29	6.64	0.41	5.67

Kapasitas Fiskal Daerah



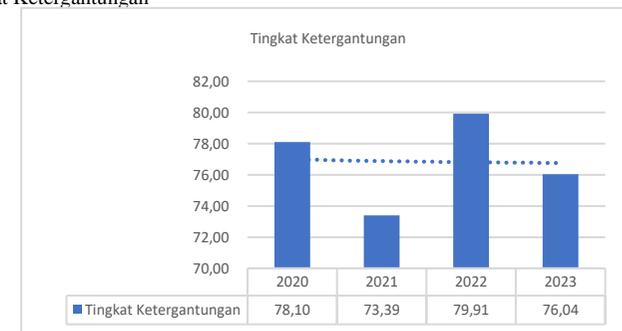
Kapasitas Fiskal berdasarkan data kementerian keuangan Kota Banjarmasin termasuk kedalam kategori sangat tinggi, artinya bahwa kemampuan keuangan untuk pengelolaan kota sangat tinggi.

Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal



Derajat Otonomi kota Banjarmasin sebesar 20,91 masih berada dalam kategori kurang dari 40%, tingkat ketergantungan terhadap pusat masih tinggi. Tren kenaikan dalam kurun waktu 4 tahun terlihat adanya kenaikan dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 0.12%

Tingkat Ketergantungan



Tingkat Ketergantungan terhadap dana pusat kota Banjarmasin sebesar 76.86% diatas ketentuan 40% termasuk kedalam kategori tinggi, kecenderungan ketergantungan terhadap dana transfer selama kurun waktu 4 tahun ( 2020 – 2023) menunjukkan adanya penurunan rata rata -0.01 pertahun.

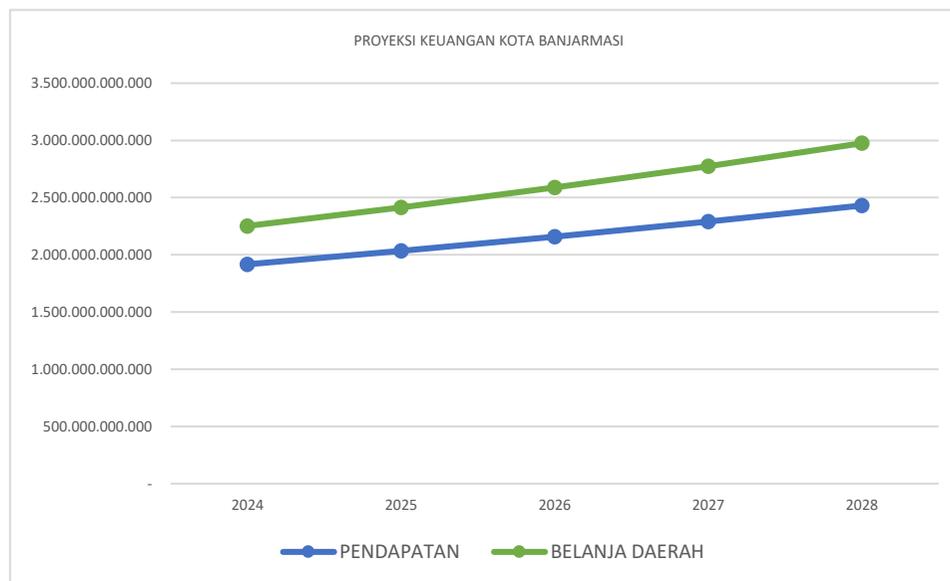
Dari hasil analisis rasio kota Banjarmasin:

Bahwa Kemampuan atau kapasitas fiskal kota Banjarmasin masuk kedalam kategori tinggi, tetapi apa bila dilihat dari pendapatan atau ketergantungan terhadap dana pusat sangat tinggi. Dari hasil analisis kota Banjarmasin mempunyai potensi untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi sehingga tingkat ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi

#### 5. PROYEKSI KEUANGAN / PROGRAMAN INVESTASI

Proyeksi Keuangan

Uraian	Rata Rata Pertumbuhan	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PENDAPATAN</b>	6.12%	1,916,871,512,929	2,034,139,118,895	2,158,580,753,645	2,290,635,299,584	2,430,768,488,434
<b>BELANJA DAERAH</b>	7.21%	2,252,005,937,975	2,414,346,000,050	2,588,388,649,276	2,774,977,488,546	2,975,016,933,447



Berdasarkan grafik diatas Proyeksi pendapatan belanja kota Banjarmasin diproyeksikan sampai dengan tahun 2028, menunjukkan belanja lebih tinggi dari pendapatan, kondisi ini kurang ideal, sehingga perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan.

Sasaran/Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD

Sasaran 1: Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan

Sasaran 2: Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah

Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat

Sasaran 4: Meningkatnya daya saing investasi daerah

#### 6. RENCANA PENINGKATAN KEUANGAN KOTA

1. Melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
3. Meningkatkan peran Pihak ke 3 dalam pengembangan kota melalui dana investasi berdasarkan potensi daerah

\*) Pada laporan ringkasan dilampirkan dokumen Perkada tentang penjabaran APBD per tahun (2020-2023)

dalam mengisi form laporan ringkasan Pengembangan MFSA ini dapat berimprovisasi sesuai dengan kondisi daerah

**MATRIX ANALISIS KEBUTUHAN Penguatan Kapasitas  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA**

NO	URAIAN PERMASALAHAN HASIL ANALISIS	KEBUTUHAN PELATIHAN			SASARAN	TUJUAN PENCAPAIAN	JENIS PELATIHAN	MATERI PELATIHAN	NARASUMBER AHLI
		YA	TIDAK	PEMBERIAN MODUL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Pendapatan								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan pendapatan		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pendapatan daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah	LMS
2	Rendahnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pajak	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor pajak	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak	
3	Kurangnya inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pelayanan pajak dan retribusi	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi	
II	Belanja								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan belanja		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan belanja daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan belanja daerah	LMS
2	Adanya Gap antara perencanaan dengan realisasi dalam pengelolaan belanja	✓		✓	Staf pengelola perencanaan pembangunan	Meningkatkan Efektifitas dalam perencanaan	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran keuangan daerah	
3	Adanya Gap antara belanja operasi dengan belanja modal yang terlalu jauh	✓		✓	Staf Pengelola	Meningkatnya kemampuan staf dinas dalam pengelolaan belanja dan meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan kota	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Efektifitas Pengelolaan proporsi belanja daerah yang ideal	
III	Peran Pihak ke-3 dalam pengelolaan kota								
1	Kurangnya keterlibatan pihak ke-3 dalam percepatan Pembangunan kota	✓		✓	Staf pengelola	Meningkatnya pertumbuhan ekonom daerah	Seminar	Strategi peningkatan investasi pihak ke-3 dalam Pembangunan kota	